

## BAB V

### KESIMPULAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penulisan skripsi yang berjudul “*Konflik Irlandia Utara (Kajian Historis Tahun 1966-1998)*”. Kesimpulan tersebut merujuk pada jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis di dalam bab sebelumnya. Sesuai dengan rumusan masalah pada bab I, terdapat tiga hal yang penulis simpulkan berdasarkan permasalahan yang dibahas. *Pertama*, apa yang menjadi latar belakang terjadinya konflik etno-politik di Irlandia Utara sebelum tahun 1966? *Kedua*, Bagaimana proses terjadinya konflik etno-politik di Irlandia Utara tahun 1966-1998? *Ketiga*, Bagaimana proses penyelesaian konflik etno-politik tahun 1966-1998? Maka kesimpulan yang penulis peroleh adalah sebagai berikut.

*Pertama*, konflik di Irlandia Utara mempunyai latar belakang yang sangat panjang secara historis, di mana etnis Kelt yang mendiami kepulauan Britania termasuk pulau Irlandia kemudian dikuasai oleh kekaisaran Romawi, Romawi kemudian mewariskan peradaban dan kebudayaan pada orang-orang Kelt di kepulauan Britania, termasuk agama Katolik Roma. Ketika kekaisaran Roma jatuh pada abad ke-5 mereka kemudian meninggalkan kepulauan Britania, setelah itu kemudian bangsa Anglo menginvasi kepulauan Britania, hal ini menjadi awal permusuhan yang berujung konflik antara etnis Kelt dengan etnis Anglo, kepulauan Britania yang telah diwarisi peradaban dan kebudayaan Romawi akhirnya secara perlahan tergantikan oleh kebudayaan Anglo, maka pendekatan

**Pepi Munawir Hafidz, 2012**

**Konflik Irlandia Utara**

: Kajian Historis Tahun 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

interdisipliner dengan menggunakan konsep etnis sangat berperan penting untuk mengkaji permasalahan ini.

Etnis Kelt yang tersebar di kepulauan Britania secara perlahan menjadi terpusat di wilayah pulau Irlandia, maka etnis Kelt inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya orang-orang *Irish*, sementara etnis Anglo menjadi cikal bakal lahirnya orang-orang *English*. Ketika kerajaan Inggris memutuskan untuk keluar dari struktur Gereja Katolik Roma pada tahun 1592 dan kemudian membuat Gereja Nasional, orang-orang di Irlandia tidak lantas mengikuti hal tersebut karena orang-orang Kelt masih banyak terpengaruh oleh kebudayaan Romawi, maka ketika terjadi penutupan Gereja-gereja Katolik Roma di Irlandia akibat kebijakan kerajaan Inggris yang keluar dari Gereja Roma, orang-orang Katolik Roma yang berada di Irlandia menjadi tidak simpati terhadap Inggris, hal ini berujung kepada lahirnya tindakan diskriminatif terhadap orang-orang Irlandia. Karena hal tersebut kemudian orang-orang Irlandia menjadikan agama Katolik Roma yang dianut oleh mereka sebagai sikap anti Inggris, yang menjadi awal lahirnya konflik yang bersifat sentimen agama atau sektarianisme ditambah dengan kemenangan William of Orange (yang beragama Protestan) terhadap James II (yang didukung oleh orang Katolik Irlandia) pada 12 Juli 1690 membuat kebencian mereka semakin bertambah kuat.

Irlandia yang merupakan wilayah koloni dari pemerintahan Inggris mengalami eksploitasi yang dilakukan oleh imigran asal Inggris dan Skotlandia yang berabad-abad sebelumnya sengaja dimasukkan ke wilayah tersebut guna memantapkan kekuasaan Inggris di Pulau itu, hal tersebut menjadi dasar lahirnya

**Pepi Munawir Hafidz, 2012**

**Konflik Irlandia Utara**

: Kajian Historis Tahun 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

nasionalisme bangsa Irlandia, maka pada sekitar pertengahan abad ke-19 muncul benih-benih nasionalisme pada masyarakat bangsa Irlandia di mana kebanggaan kebangsaan di masa lampau dikobarkan untuk bersatu melawan dominasi Inggris, hal tersebut berujung pada peristiwa *Easter Rising*, sebuah peristiwa yang bertujuan untuk memproklamkan kedaulatan Irlandia pada tahun 1916. Karena semakin derasnya gerakan nasionalisme bangsa Irlandia, hal ini kemudian membuat Inggris untuk memutuskan menyetujui didirikannya *Irish Free State* (Negara Irlandia Merdeka) pada tahun 1921, akan tetapi Inggris tetap berkuasa atas sebagian wilayah pulau Irlandia dengan tetap menguasai Ulster (wilayah Irlandia bagian utara) dengan dasar ingin melindungi hak warga Ulster yang menginginkan tetap di bawah kekuasaan Inggris, karena wilayah tersebut merupakan wilayah tempat bermukimnya warga-warga keturunan Inggris. Hal tersebut menjadikan peluang untuk terjadi konflik kembali semakin besar, di mana orang-orang nasionalis Irlandia menginginkan Pulau Irlandia merdeka secara penuh dan membebaskan Ulster dari Inggris, sementara orang-orang Ulster bersikeras ingin tetap bergabung bersama Inggris karena mereka menganggap mereka berbeda secara budaya, etnis dan kepercayaan dengan orang-orang Irlandia, bahkan secara agama orang-orang yang berada di wilayah Ulster kebanyakan beragama Protestan.

*Kedua*, dengan menggunakan pendekatan interdisipliner berupa konsep konflik dari sosiologi penulis bisa menyimpulkan bahwa konflik di Irlandia Utara yang berawal di tahun 1966 dipicu atas klaim dari orang-orang Katolik yang tinggal di Irlandia Utara terhadap perlakuan diskriminatif secara sosial, politik dan

**Pepi Munawir Hafidz, 2012**

**Konflik Irlandia Utara**

: Kajian Historis Tahun 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

ekonomi dari orang-orang pemerintahan (yang didominasi oleh orang-orang Protestan) terhadap mereka. Irlandia Utara sendiri menjadi wilayah yang bermayoritaskan orang-orang Protestan dan orang-orang yang loyal terhadap kerajaan Inggris (Unionis), sementara orang-orang Katolik yang juga orang-orang yang menginginkan Irlandia Utara bebas dari Inggris (Nasionalis) menjadi minoritas di wilayah ini. Ketika Terence O'Neill memutuskan membuat kebijakan untuk berkompromi dengan orang-orang Katolik/Nasionalis hal tersebut membuat keadaan menjadi semakin keruh, orang-orang Unionis menganggap bahwa kebijakan tersebut malah memberikan ruang gerak yang lebih terhadap orang-orang Nasionalis untuk mewujudkan penyatuan Irlandia.

Konflik antara kaum Katolik/Nasionalis dengan kaum Protestan/Unionis bersifat peperangan terbuka secara fisik juga secara politik, secara militer konflik ini diwakili oleh organisasi paramiliter yang dibentuk oleh masing-masing pihak, kaum Katolik/Nasionalis diwakili oleh IRA, PIRA, dan OIRA sementara kaum Protestan/ Unionis diwakili oleh UVF dan UDA. Secara politik konflik ini diwakili oleh organisasi politik yang juga dibentuk oleh masing-masing pihak, organisasi politik yang mewakili kaum Katolik/Nasionalis adalah, NICRA, PD, Sinn Fein, dan SLDP, sementara organisasi politik yang mewakili kaum Protestan/ Unionis adalah DUP, UUP, UDP dan UKUP. Karena korban yang terus berjatuhan dan kondisi yang terus memburuk, hal ini membuat tentara Inggris diterjunkan pada tahun 1969 ke wilayah konflik demi menjaga keamanan dan stabilitas wilayah tersebut, sehingga konflik ini pun tidak terlepas dari campur tangan Inggris. Konflik ini berlangsung kelam dan memprihatinkan karena korban

**Pepi Munawir Hafidz, 2012**

**Konflik Irlandia Utara**

: Kajian Historis Tahun 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

yang dihasilkan mencapai lebih dari 3000 orang yang tewas, konflik ini menjadi susah dikendalikan karena dibalut oleh masalah yang kompleks yakni sektarianisme (permusuhan antara Katolik-Protestan), masalah etnis (permusuhan antara etnis *Irish-English*), kondisi sosial-ekonomi (perlakuan diskriminasi) serta politik (antara Nasionalis dengan Unionis) di mana masalah tersebut sudah menjadi akar masalah yang belum teratasi sejak berabad-abad yang lalu di wilayah tersebut.

*Ketiga*, proses penyelesaian konflik di antara kedua belah pihak yang bertikai adalah dengan mengadakan beberapa pembicaraan yang diprakarsai oleh pemerintah Inggris, pemerintah Republik Irlandia serta perwakilan dari organisasi politik yang mewakili kedua belah pihak yang bertikai dan kemudian pembicaraan ini melahirkan perjanjian atau kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh semua pihak demi terciptanya kedamaian di Irlandia Utara. Beberapa kesepakatan yang lahir untuk menyelesaikan konflik ini di antaranya; *The Sunningdale Agreement* yang dilaksanakan pada tanggal 6,7,8 dan 9 Desember 1973 di Sunningdale Inggris, *Anglo-Irish Agreement* yang ditandatangani pada November 1985 oleh perdana menteri Inggris Margaret Thatcher dengan kepala pemerintahan Republik Irlandia Garret FitzGerrald di Hillborough, *Brooke-Mayhew Talks* yang dilaksanakan antara April 1991 dan November 1992, *Joint Declaration* yang diprakarsai pada tanggal 15 Desember 1993 oleh perdana menteri Irlandia Albert Reynolds dengan perdana menteri Inggris John Major, *The Framework Document* diprakarsai oleh John Burton sebagai perdana menteri Irlandia dan John Major sebagai perdana menteri Inggris pada tahun 1995 dan *Good Friday Agreement*

**Pepi Munawir Hafidz, 2012**

**Konflik Irlandia Utara**

: Kajian Historis Tahun 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

yang ditandatangani oleh pemerintah Inggris, Irlandia serta partai-partai politik yang ada di Irlandia Utara di Stormont Belfast, pada hari jumat tanggal 10 April 1998 di Belfast.

Banyaknya perundingan dan kesepakatan-kesepakatan yang lahir, membuktikan bahwa hasil kesepakatan tersebut sangat sulit untuk direalisasikan, karena setiap kesepakatan yang dilahirkan selalu mendapatkan penolakan dan perlawanan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh hasil kesepakatan tersebut. Garis besar dalam isi kesepakatan-kesepakatan yang dilahirkan adalah; (1) Membahas tentang usaha untuk meminimalisir diskriminasi yang dianggap sudah berlangsung di Irlandia Utara, termasuk pembagian kursi dalam dewan Irlandia Utara yang komposisinya akan dibagi rata untuk orang-orang Protestan maupun Katolik. (2) Membahas tentang masalah konstitusi negara di mana wilayah Irlandia Utara tetap menjadi bagian dari Inggris akan tetapi hal tersebut bisa berubah jika mayoritas penduduk Irlandia Utara menginginkan dan memutuskan untuk bergabung dengan Republik Irlandia Utara. (3) Membahas tentang kebijakan untuk menciptakan kedamaian, menyelesaikan masalah keamanan dan proses stabilisasi untuk menjaga wilayah tersebut tetap kondusif. Kesepakatan-kesepakatan dan perjanjian tersebut berhasil meredam konflik yang telah terjadi selama puluhan tahun di Irlandia Utara.